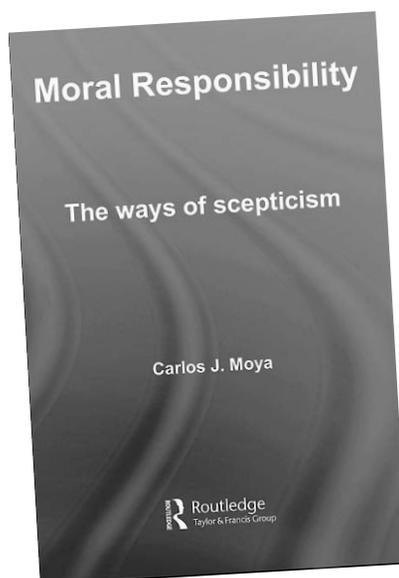


MEMBELA TANGGUNG JAWAB MORAL

Oleh Yeremias Jena

Judul : *Moral Responsibility, the Ways of Scepticism*
 Pengarang : Carlos J. Moya
 Penerbit : Routledge, London and New York, 2006
 Tebal : xii + 233 halaman
 ISBN : ISBN 0415371953



Kita bereaksi cukup keras terhadap berbagai pelanggaran norma moral, baik itu dilakukan oleh para pejabat publik, maupun anggota masyarakat biasa. Demikianlah, kita kecewa dan marah ketika pejabat publik melakukan tindakan korupsi, menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau golongan, mangkir dari tugas dan tanggung jawabnya, membuat kebijakan publik yang merugikan kepentingan masyarakat, merekayasa proses pengadilan, dan sebagainya. Kita juga marah ketika ada anggota masyarakat (individu) bertindak asusila atau perilaku kriminal lainnya. Kekecewaan dan kemarahan kita merefleksikan sikap moral yang umum diterima, bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral terhadap apa yang dipikirkan, dikatakan, diucapkan, dan tindakan-tindakannya. Reaksi kita mengungkapkan suatu kelaziman pemahaman mengenai tanggung jawab moral sebagai semacam *property of human agents*.

Di sini kita seakan menerima begitu saja, bahwa individu memang memiliki tanggung jawab moral. Bahwa bagian dari tanggung jawab moral pejabat publik adalah bekerja berdasarkan etos kerja yang baik, merealisasikan kepentingan masyarakat, dan membebaskan diri dari sikap dan/atau tindakan yang merugikan kepentingan umum. Tanggung jawab moral yang sama juga dituntut dari setiap individu, bahwa usaha mentaati norma moral publik adalah hal yang tidak bisa ditawar sejauh seseorang adalah bagian integral masyarakat. Dalam arti itu seakan menjadi kelaziman bahwa sebagai individu yang memiliki tanggung jawab moral, kita adalah pelaku moral yang bebas dan yang memiliki kehendak bebas. Bahwa

kegagalan sebagai pelaku moral yang bebas dalam mentaati norma moral akan dikecam, sementara keberhasilan menyesuaikan diri dengan norma moral akan dipuji dan didukung.

Sejauh kesadaran semacam ini diterima begitu saja, kita sebetulnya bisa menyebutnya sebagai semacam kondisi alamiah. Buku Carlos Moya berjudul *Moral Responsibility: The Ways of Scepticism* (Routledge, London and New York: 2006) menyebut kesadaran ini sebagai “kondisi alamiah” dalam pengertian kesadaran individu akan tanggung jawab moral sebagaimana umum berlaku dalam masyarakat. Bagian dari kesadaran alamiah itu tidak hanya sikap mengecam atau mendukung pelanggaran atau ketaatan pada norma moral, tetapi juga afirmasi terhadap kebebasan dan kehendak bebas sebagai hal yang konstitutif bagi tanggung jawab moral itu sendiri.

Sama seperti sikap tidak kritis dan dogmatis pada umumnya, menerima begitu saja tanggung jawab moral sebagai bagian integral dari sikap dan tindakan pelaku moral justru dapat menjerat dan membelenggu kesadaran moral kita sendiri, seakan-akan tanggung jawab moral sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Kalaupun tanggung jawab moral disepakati sebagai aspek tak-terelakkan dari totalitas sikap dan tindakan moral, dalam arti apa kita harus memahami keniscayaan ini? Dalam diskursus etika kontemporer mengenai tanggung jawab moral, Carlos Moya justru melihat tren meningkatnya sikap skeptisisme terhadap tanggung jawab moral. Kesimpulan ini berdasarkan analisis Carlos Moya terhadap beberapa buku etika yang terbit dua dekade terakhir, sebut saja *The Non-Reality of Free Will* (1991), *Free Will and Illusion* (2000), *Living Without Free Will* (2001) serta ratusan artikel di jurnal filsafat dan etika. Menurut Carlos Moya, keyakinan tradisional terhadap tanggung jawab moral sebagai bagian konstitutif kesadaran moral justru digerogeti oleh sikap skeptis para filsuf modern terhadap kehendak bebas.

Bagi Carlos Moya, buku-buku tersebut jelas menyangkal realitas kehendak bebas (*free will*). Masalahnya, jika kehendak bebas disangkal, apakah tanggung jawab moral dengan sendirinya ditolak? Carlos Moya mendeteksi sesuatu yang menarik, bahwa di tengah upaya menyangkal kehendak bebas, muncul semacam upaya untuk mencegah agar skeptisisme terhadap kehendak bebas tidak merambah ke skeptisisme terhadap tanggung jawab moral. Dengan kata lain, orang boleh saja menyangkal kehendak bebas asal jangan menegasikan tanggung jawab moral. Moya melihat bahwa usaha pencegahan itu dilakukan dengan mengatakan bahwa kehendak bebas (*free will*)—yang dipahami sebagai kebebasan untuk memilih dan bertindak secara berbeda—dan tanggung jawab moral bersifat

independen satu sama lain alias tidak saling mengandaikan (Carlos Moya/CM: 2).

Dalam konteks inilah Carlos Moya melihat dua tren yang saling melengkapi dalam diskursus etika mengenai tanggung jawab moral. Di satu pihak muncul sikap skeptis terhadap tanggung jawab moral sebagai bagian integral dari kesadaran dan sikap moral individu. Tetapi di lain pihak ada upaya untuk mempertahankan tanggung jawab moral dengan mengajukan tesis bahwa kehendak bebas dan tanggung jawab moral tidak saling mengandaikan, sehingga menegasi yang satu tidak secara otomatis meniadakan yang lainnya. Bagi Carlos Moya, cara berargumentasi semacam ini bukan hanya tidak menyakinkan, tetapi juga melumpuhkan kemampuan argumentasi kita mempertahankan tanggung jawab moral dan kehendak bebas sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kesadaran dan tindakan moral manusia.

Buku ini sebenarnya merupakan usaha serius mempertahankan tanggung jawab moral dan kehendak bebas sebagai bagian konstitutif dari manusia sebagai pelaku moral (*moral agent*). Pembelaan ini dilakukan dengan mematahkan argumen-argumen yang dikemukakan kaum skeptis yang menegasikan tanggung jawab moral. Menurut Carlos Moya, biasanya ada empat argumen dasar yang dikemukakan kaum skeptis dalam menegasikan tanggung jawab moral. Keempat argumen itu dirumuskan demikian (1) determinisme bisa benar atau salah; (2) jika determinisme benar, tanggung jawab moral tentu sesuatu yang tidak mungkin; (3) jika determinisme salah, tanggung jawab moral tentu sesuatu yang tidak mungkin; dan (4) karena itu, tanggung jawab moral adalah sesuatu yang tidak mungkin. Seluruh isi buku Carlos Moya ini adalah usaha sistematis membuktikan atau lebih tepatnya meruntuhkan keempat argumen yang dikemukakan kaum skeptis tersebut.

Menyelamatkan Tanggung Jawab Moral

Dalam bab pertama dan kedua buku *Moral Responsibility: The Ways of Scepticism*, Carlos Moya membahas premis pertama yang dikemukakan kaum skeptis sekaligus memusatkan perhatiannya pada premis kedua yang sebenarnya juga didukung kaum inkompatibilis (*incompatibilist argument*). Para pendukung inkompatibilis berpendapat bahwa tanggung jawab moral menuntut adanya akses kepada kemungkinan-kemungkinan alternatif pilihan dan tindakan (*alternate possibilities*). Karena determinisme menutup atau memblok akses kepada kemungkinan atau alternatif pilihan dan tindakan, maka tuntutan terhadap tanggung jawab moral tidak mendapatkan tempat. Kaum skeptis dan kaum inkompatibilis menegasikan tanggung jawab moral.

Salah seorang filsuf yang sangat lantang mendukung inkompatibilisme tanggung jawab moral dan kebebasan adalah Peter van Inwagen. Dalam bukunya berjudul *An Essay on Free Will*, Inwagen mengatakan, “*If determinism is true, then our acts are the consequences of the laws of nature and events in the remote past. But it is not up to us what went on before we were born, and neither is it up to us what the laws of nature are. Therefore, the consequences of these things (including our present acts) are not up to us* (Clarendon Press, Oxford: 1983, hlm. 56).

Apakah dengan begitu determinisme harus diakui sebagai benar? Menurut Carlos Moya, mendasarkan diri pada cara berpikir Inwagen dan para pendukung inkompatibilisme moral, bahwa determinisme benar, maka kita harus menerima konsekuensi bahwa seluruh kejadian saat ini (termasuk seluruh tindakan manusia) adalah akibat dari hukum alam. Karena tidak ada satu orang pun memiliki kuasa atas hukum alam dan seluruh kejadian yang telah lampau, maka tak seorang pun mampu menghindari konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh hukum alam serta kejadian-kejadian masa lampau tersebut. Dalam arti ini logis saja mengatakan bahwa jika determinisme benar, kita tidak punya akses apa pun kepada *alternate possibilities* dalam tindakan kita. Sebagai pelaku moral, kita bertindak semata-mata berdasarkan perintah hukum alam yang deterministik, dan karena itu mustahil kita dituntut tanggung jawab.

Carlos Moya setuju bahwa *alternate possibilities* adalah kondisi niscaya bagi kebebasan dan tanggung jawab moral. Artinya, pelaku moral memiliki kemampuan melampaui determinisme sejauh dia memiliki kebebasan dalam memilih salah satu dari berbagai alternatif tindakan. Meskipun demikian, bagi Carlos Moya, absennya *alternate possibilities* tidak lantas berarti pelaku moral terbebaskan dari tanggung jawab moral atau pelaku moral tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban moral. Alasannya, ada kasus tertentu di mana pelaku moral bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya meskipun akses terhadap *alternate possibilities* tertutup sama sekali oleh determinisme. Dengan kata lain, pelaku moral tetap bertindak dalam cara tertentu tidak peduli seberapa besar ruang aksesnya terhadap *alternate possibilities*. Dalam hal ini dia bertanggung jawab terhadap seluruh tindakan moralnya, bahkan ketika alasan untuk mengambil keputusan dan keputusannya benar-benar tidak koheren (CM: 2006, hlm. 53).

Apakah penolakan Carlos Moya terhadap determinisme sebagaimana dikemukakan argumentasi pertama di atas cukup meyakinkan? Untuk menjawab ini kita perlu memahami juga bagaimana Moya menyangkal argumentasi kedua. Pertanyaannya, apakah argumentasi kedua tersebut memang menjadi senjata pamungkas bagi kaum skeptik untuk menolak

tanggung jawab moral ketika pelaku moral tidak memiliki *alternate possibilities* sama sekali? Apakah determinisme memberangus total *alternate possibilities*?

Menyimak pertanyaan ini kita sebenarnya teringat perdebatan klasik kelompok *compatibilist* dan kelompok *incompatibilist*. Bagi kaum kompatibilis, meskipun ada determinisme—segala sesuatu terjadi karena disebabkan oleh sesuatu sebelumnya—pelaku moral tetap memiliki tanggung jawab atas seluruh tindakan moralnya persis ketika dia memiliki kehendak bebas (*free will*). Jadi, misalnya apakah Anda akan melakukan tindakan korupsi atau tidak jika Anda bekerja di sebuah institusi dengan strukturnya yang memberi ruang bagi tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan? Kalau struktur institusi yang koruptif tersebut diposisikan sebagai pendeterminasi tindakan, maka menurut kaum skeptis dan pembela inkompatibilisme (*incompatibilists*), pelaku moral yang melakukan korupsi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban moral. Sementara bagi pendukung kompatibilisme moral, determinisme dan tanggung jawab moral tidak perlu diperlawankan. Justru ketika manusia memiliki kehendak bebas, dia sebetulnya membuka diri kepada kemungkinan tindakan (*alternate possibilities*). Dalam arti ini sebetulnya *alternate possibilities* memungkinkan pelaku moral bertindak melampaui dikte determinisme.

Harry Frankfurt termasuk filsuf yang secara sistematis berargumentasi mendukung pandangan kaum inkompatibilis. Dalam artikelnya berjudul *Alternate Possibilities and Moral Responsibility* (*Journal of Philosophy*, Tahun 1969, No. 66, hlm. 829-839), Frankfurt menolak *alternate possibilities* sebagai prinsip yang mengafirmasi tanggung jawab moral. Penolakan semacam ini menimbulkan pertanyaan kritis apakah determinisme memang memiliki kemampuan menutup akses pelaku moral kepada *alternate possibilities*? Nyatanya kebanyakan kita nyaris tidak pernah mempersoalkan *alternate possibilities* karena memang cocok sesuai dengan intuisi kita tentang tanggung jawab moral. Kebanyakan kita justru beranggapan bahwa *alternate possibilities* adalah prinsip tindakan yang sanggup mempengaruhi *reasonable desire* tentang tanggung jawab moral, bahwa kita bisa mengontrol perilaku kita.

Apa konsekuensinya jika prinsip *alternate possibilities* sama sekali ditolak? Menolak prinsip ini bagi Moya sama saja dengan mendukung skeptisisme moral sebagaimana diusung David Hume dan para pendukungnya, bahwa dari sesuatu yang ada (*is*) kita tidak bisa menarik suatu keharusan (*ought*) (CM: 2006, hlm. 27). Lebih tegas lagi, bagi Moya, menolak prinsip *alternate possibilities* sama saja dengan menghancurkan dan membunuh etika itu sendiri. Tentang hal ini Moya memberi contoh berikut. Ketika kita mengecam tindakan seseorang, kita melakukan ini karena asumsi

bahwa dia seharusnya (*she ought*) atau wajib bertindak sebaliknya (*alternate possibilities*). Dalam konteks etika praktis, menyangkal prinsip *alternate possibilities* sama artinya dengan mengamini tindakan tidak bermoral tertentu, hal yang dalam kehidupan bersama hampir mustahil ditolerir. Berhadapan dengan orang atau kelompok tertentu yang melanggar prinsip moral, kita justru mengecam atau menghujat tindakan-tindakan tersebut. Ini menunjukkan bahwa mereka seharusnya bertindak lain (*alternate possibilities*) dari tindakan aktual mereka.

Mari kita kembali ke cara berargumentasi kaum inkompatibilis. Mengikuti prinsip yang mereka usung, kegagalan bertindak dalam cara yang disepakati secara moral sebenarnya mengimplikasikan bahwa pelaku moral tidak mampu membebaskan diri dari determinisme. Bagi kaum inkompatibilis, kecaman kita terhadap mereka yang gagal mendasarkan tindakan pada prinsip moral tertentu tidaklah relevan dan gugur dengan sendirinya (CM: 2006, hlm. 27). Jika kita tetap bersikukuh mendesak tanggung jawab moral kepada pelaku moral tersebut, kita memberikan beban moral berlebihan kepada dia yang seharusnya tidak perlu dia pikul. Sebagai pendukung utama inkompatibilisme, Harry Frankfurt sendiri berpendapat bahwa jika membebaskan tanggung jawab moral kepada pelaku moral demi menyelamatkan tanggung jawab moral sebagaimana kita asumsikan eksistensinya, kita justru membebani dia secara berlebihan dan melampaui apa yang seharusnya tidak ditanggungnya.

Apakah dengan begitu Harry Frankfurt berhasil menolak tanggung jawab moral sebagai hal yang kompatibel dengan kebebasan dan tindakan moral? (CM: 2006, hlm 28)? Carlos Moya membuktikan bahwa Harry Frankfurt tidak berhasil menolak prinsip *alternate possibilities*. Menurut Moya, apa yang dilakukan Frankfurt sebetulnya ingin menguji keyakinan intuisi kita, bahwa tanggung jawab moral itu pasti ada karena adanya prinsip *alternate possibilities*. Tetapi ketika alternatif tindakan itu absen sama sekali, misalnya karena paksaan atau tekanan seperti yang diasumsikan Frankfurt, apakah masih ada tanggung jawab moral? Menurut Carlos Moya, di hadapan determinisme yang sangat keras sekali pun, setiap pelaku moral sebenarnya memiliki kemampuan mengoperasikan prinsip alternatif tindakan yang mungkin (*the principle of possible action/PPA*) yang intinya menegaskan bahwa “*a person is morally responsible for failing to perform a given act if he could have performed that act*” (CM: 2006, hlm. 30). Di sini Carlos Moya ingin menegaskan bahwa baik prinsip alternatif tindakan maupun PPA sama-sama merupakan prinsip tindakan (dilaksanakan atau tidak dilaksanakan) yang menuntut tanggung jawab moral; jadi, bukan situasi atau kasus hipotesis.

Prinsip ini akan semakin kuat jika ditambah dengan prinsip kemungkinan pencegahan (*principle of possible prevention*). Misalnya, ketika mengetahui adanya perampokan dan seseorang *tidak* menelpon polisi, dia dikecam karena tidak memiliki tanggung jawab. Tetapi ketika dia tidak menelpon karena jaringan telpon sedang rusak, dia tidak bisa dikecam atau dipersalahkan (CM: 2006, hlm. 32). Artinya seseorang harus mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya jika tindakan-tindakan ada dalam kemampuannya untuk melakukannya. Di sini determinisme, prinsip alternatif tindakan, dan prinsip alternatif tindakan yang mungkin ketiganya diapresiasi dan diberi tempat.

Tidak Cukup dengan Mengendalikan Determinisme

Carlos Moya terus mendiskusikan masalah tanggung jawab moral ini di bab ketiga bukunya. Menarik mencermati bagaimana Moya membela tanggung jawab moral di bab ini. Menurut dia, setiap pelaku moral bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya bukan semata-mata karena dialah sumber atau alasan terjadinya sesuatu (CM: 2006, hlm 76), tetapi sekaligus juga bahwa tindakan-tindakannya itu dipuji atau dikecam. Pujian atau kecaman karena tindakan tertentu bukan pertama-tama karena pelaku moral menjadi sebab atau alasan terjadinya sebuah tindakan moral, tetapi lebih karena tindakan-tindakan moral tersebut bersifat evaluatif. Setiap tindakan yang sifatnya evaluatif dikategorikan sebagai tindakan moral. Tindakan moral menuntut justifikasi, karena itu tanggung jawab moral menjadi hal yang mutlak perlu bagi upaya justifikasi tindakan (CM: 2006, hlm. 77).

Meskipun demikian, ada kondisi-kondisi tertentu yang dituntut demi terjadinya tanggung jawab moral. Berhadapan dengan kuatnya serangan determinisme, Carlos Moya mengusulkan pentingnya memegang kendali dan tidak membiarkan diri dikuasai determinisme. Justru kemampuan memegang kendali inilah yang pada akhirnya menentukan apakah seorang pelaku moral pantas dipuji atau dicela secara moral (CM: 2006, hlm. 77). Bagaimana pelaku moral bisa memiliki kendali atau kontrol atas seluruh tindakan moralnya? Moya sebenarnya meminjam konsep Kanti tentang tanggung jawab moral, bahwa setiap pelaku moral yang rasional memiliki otonomi moral bukan saja karena dia tidak mendasarkan tindakan-tindakan moralnya pada prinsip-prinsip tindakan eksternal tertentu, tetapi juga karena kemampuannya menetapkan prinsip-prinsip tindakan yang rasional dan universal sebagai prinsip penjustifikasi seluruh perbuatan moralnya (CM: 2006, hlm. 78).

Pembelaan Moya terhadap tanggung jawab moral juga didasarkan pada tilikannya yang simpatik pada pemikiran kompatibilisme (klasik). Sebagaimana kita ketahui, kaum kompatibilis berpendapat bahwa tanggung jawab moral dan determinisme tidak perlu dipertentangkan karena keduanya bersifat koeksistensi. Justru berhadapan dengan kuatnya determinisme, tanggung jawab moral semakin dituntut karena manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan, termasuk kebebasan mengendalikan hasrat-hasratnya dan memutuskan tindakan apa yang diambil (CM: 2006, hlm. 80). Bahwa karena kebebasan dan kehendak bebas (*free will*), pelaku moral memiliki kemampuan menentukan-diri (CM: 2006, hlm. 82) dan memegang kendali atas seluruh tindakannya.

Pandangan kaum kompatibilis (klasik) ini mengandung kelemahan mendasar jika aspek kebebasan dan kendali utama yang dipegang pelaku moral atas seluruh tindakan moralnya tidak didasarkan pada kehendak bebas (*free will*). Bagi pemikir inkompatibilis seperti Frankfurt, kebebasan yang dimiliki pelaku moral dalam menentukan tindakan-tindakannya belum mencerminkan apakah tindakan-tindakannya betul-betul merupakan tindakan moral atau tidak? Skeptisisme Frankfurt ini mendesak kita untuk menegaskan bahwa tindakan moral yang patut dimintai pertanggungjawaban hanyalah yang bersumber dari kehendak bebas, yakni kehendak untuk menentukan hasrat (*desire*) tertentu sebagai tindakannya dan mengesampingkan atau menolak merealisasikan hasrat-hasrat lainnya. Mengandalkan hanya aspek kebebasan dalam menentukan dan mengendalikan tindakan sebetulnya belum membedakan secara distingtif tindakan-tindakan manusia dan binatang. Tindakan yang betul-betul bebas harus berasal dari kehendak-bebas, yakni kehendak yang menginginkan dan mengeksekusi hasrat tertentu sebagai tindakannya. Baru pada tahap inilah seorang pelaku moral memiliki kebebasan bertindak (*freedom of action*) dalam artinya yang penuh (CM: 2006, hlm. 84-91).

Berbeda dengan prinsip kompatibilisme klasik dan kritik Frankfurt, cara Gary Watson membela tanggung jawab moral pun menarik dideskripsikan (CM: 2006, hlm. 91). Gary Watson sebagaimana diangkat Carlos Moya dalam bukunya, berpendapat bahwa kompatibilisme klasik tidak memadai karena menganalisis kebebasan hanya berdasarkan kontrol pelaku moral atas hasrat-hasratnya. Sementara pandangan Frankfurt pun belum menyentuh ke persoalan bagaimana pelaku moral dapat menginginkan hasrat tertentu dan mengeliminasi hasrat-hasrat lainnya? Watson memperlihatkan bahwa ada semacam mekanisme psikologis yang

beroperasi dalam diri manusia ketika harus menentukan tindakan-tindakan tertentu yang harus diambil.

Seorang Gary Watson akan mengatakan bahwa manusia memiliki hasrat sekaligus juga nilai-nilai (*values*). Ketika timbul hasrat tertentu untuk melakukan tindakan tertentu, manusia sebagai makhluk rasional melakukan apa yang disebut "*rational judging*" (CM: 2006, hlm. 92). Hasrat yang memicu tindakan dievaluasi dan diputuskan secara rasional dengan mengacu kepada nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai yang pro kepada hasrat tertentu yang menguatkan tindakan moral tertentu menjadikan hasrat sebagai "keinginan-yang-rasional" (*rational want*), sementara hasrat lainnya tetap tinggal sebagai sekadar hasrat (*mere desire*). Melalui proses psikologis semacam inilah seorang pelaku moral menimbang, memutuskan, dan mengambil tindakan-tindakan moralnya setiap hari. Dalam konteks ini pula tanggung jawab moral melekat erat pada tindakan-tindakan rasional setiap pelaku moral.

Melalui referensi kepada berbagai pemikiran semacam inilah Carlos Moya menegaskan posisi pemikirannya, bahwa tanggung jawab moral tidak pernah bisa dipisahkan dari setiap tindakan moral. Bagi Carlos Moya, kalau pun determinisme benar, tanggung jawab moral tidak harus dipertentangkan dengannya. Justru melalui memahami secara benar apa itu kebebasan, apa itu kehendak bebas, serta mekanisme psikologis dalam pengambilan keputusan dan tindakan moral, kita dapat memahami secara lebih baik apa itu tanggung jawab moral (CM: 2006, hlm. 112-113). Di tangan Carlos Moya, tanggung jawab moral "diselamatkan" oleh konsep mengenai kehendak bebas, kemampuan menentukan diri, kemampuan mengendalikan determinisme melalui berbagai pertimbangan rasional yang mengatasi dorongan atau hasrat, serta kemampuan melakukan pilihan tindakan moral berdasarkan referensi pada nilai-nilai tertentu.

Kemampuan Menghadapi Pluralisme Moral

Bab ketiga buku ini khusus membahas premis ketiga, bahwa jika determinisme betul, maka tanggung jawab moral tidak ada. Ini karena tanggung jawab moral mengandaikan adanya kontrol akhir pelaku moral atas tindakan-tindakannya. Karena determinisme telah menolak kontrol atau pemegang kendali, tanggung jawab moral dengan sendirinya pun ikut dinegasikan. Demikianlah, bab tiga buku ini antara lain mendiskusikan penolakan terhadap tanggung jawab moral dengan menegaskan kemampuan pelaku moral sebagai pengendali akhir seluruh tindakan moralnya.

Masih tentang tanggung jawab moral, bab keempat buku ini membahas “penolakan” kelompok kompatibilisme moral terhadap tanggung jawab moral. Meskipun para pendukung kompatibilisme moral tidak memosisikan determinisme dan tanggung jawab dalam tindakan moral sebagai dua hal yang saling meniadakan, mereka tetap menetapkan semacam kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar pelaku moral memiliki tanggung jawab moral atas tindakan-tindakannya. Bagi kaum kompatibilis, *alternate possibilities* adalah kondisi yang perlu (*necessary condition*) bagi tanggung jawab moral, tetapi belum menjadi kondisi yang memadai (*sufficient condition*). Menurut Carlos Moya, kaum kompatibilis memandang perbedaan ini penting karena mereka berpendapat bahwa pada saat pelaku moral mengeksekusi tindakan moral tertentu (*chosen action*), bisa saja terjadi bahwa pilihan tindakan tersebut diambil secara serampangan (*arbitrary*). Bagi mereka, pelaku moral tidak bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya jika keputusan untuk bertindak diambil secara serampangan. Hal yang sama juga terjadi ketika eksekusi tindakan moral tertentu dipengaruhi oleh manipulasi eksternal tertentu yang menyebabkan pelaku moral tidak menjadi pengontrol akhir tingkah laku moralnya. Demikianlah, *alternate possibilities* sekaligus bisa menjadi *sufficient condition* jika berbagai kondisi kontrol diperhatikan, entah itu pengontrol akhir yang dimainkan pelaku moral atas tindakan-tindakannya maupun manipulasi eksternal tertentu yang turut mempengaruhi eksekusi tindakan moral (CM: 2006, hlm 114-115).

Carlos Moya sebetulnya setuju, bahwa *control condition* merupakan aspek yang penting diperhatikan dalam tindakan moral, karena aspek ini menggarisbawahi kebebasan manusia. Mempertimbangkan sungguh-sungguh berbagai kondisi pengontrol ini akan membantu kita membedakan tindakan-tindakan moral mana yang eksekusinya sangat dikondisikan oleh manipulasi eksternal tertentu dan perilaku moral mana yang sungguh-sungguh merupakan pilihan bebas pelaku moral. Dalam arti ini Carlos Moya mengapresiasi cara berpikir kritis kaum kompatibilis, bahwa *alternate possibilities* hanya bisa menjadi prinsip yang memberi ruang bagi kemungkinan pelaku moral melampaui determinisme moral jika prinsip tersebut menjadi kondisi yang perlu sekaligus kondisi yang niscaya. Carlos Moya kemudian menambahkan kemampuan refleksi evaluatif (*evaluative reflection*) sebagai aspek lain yang tidak kalah penting dalam melampaui determinisme moral. Bagi Moya, dengan kemampuan refleksi evaluatif, pelaku moral yang inteligen dan rasional dapat bebas memilih tindakan-tindakannya dan menjadi pengontrol akhir seluruh perilakunya (CM: 2006, hlm 115). Inilah faktor-faktor konstitutif yang menentukan kadar tanggung jawab moral setiap pelaku moral. Bagi Moya, setiap tindakan moral

mengandung tanggung jawab moral jika tindakan tersebut diambil oleh pelaku moral yang rasional dan inteligen, yang mengeksekusi tindakan-tindakannya bukan secara serampangan (*arbitrary*), tetapi berdasarkan pertimbangan rasional dan pilihan atas prinsip moral tertentu. Inilah kemampuan refleksi evaluatif yang menampilkan sekaligus berbagai pilihan tindakan dan mengeksekusi tindakan moral tertentu yang paling bisa dipertanggungjawabkannya (CM: 2006, hlm 116).

Harus diakui, semua yang dideskripsikan di sini adalah keadaan atau kondisi ideal. Pertanyaannya, apakah seorang pelaku moral tidak bertanggung jawab atas tindakan-tindakan moralnya jika dia bukanlah pengontrol terakhir (*the ultimate control*) tindakan-tindakannya? Jadi misalnya, apakah si A tidak bisa dipersalahkan secara moral jika tindakan korupsi yang melibatkan dirinya terjadi karena sistem birokrasi kekuasaan di mana dia menjadi bagiannya “mengharuskan” demikian? Bagi Carlos Moya, tanggung jawab moral tidak harus diakui atau dinegasi dengan hanya melihat apakah pelaku moral merupakan pengontrol terakhir tindakan-tindakannya atau tidak. Demi mempertahankan argumennya ini, Carlos Moya memperdalam makna konsep “pengontrol terakhir” (*ultimate control*) tersebut. Apa yang dimaksud dengan “pengontrol terakhir” dan bagaimana kita memahaminya secara proporsional sebagai kondisi yang niscaya bagi tanggung jawab moral?

Menurut Carlos Moya, *ultimate control* terdiri dari kata “*ultimacy*” dan “*control*”. *Ultimacy* menekankan aspek “*the absence of sufficient antecedent causes, beyond the agent’s reach, of the controlling factor, be it a practical judgement, a choice, or even the agent herself*”; dan ini menentukan pelaku moral sebagai *the ultimacy* (CM: 2006, hlm. 117). Sementara itu, dengan *control* dimaksud untuk menekankan aspek rasional, volisional, evaluatif dari tindakan moral. Demikianlah, Si A adalah *the ultimacy* jika dia tidak didikte oleh faktor pengontrol eksternal apapun. Ketika hendak mengeksekusi tindakan moral tertentu, Si A adalah pelaku moral yang rasional, yang memiliki kehendak, yang berkat refleksi evaluatifnya mampu mengambil tindakan moral tertentu yang dapat dipertanggungjawabkannya.

Lagi-lagi ini adalah gambaran kondisi ideal pengambilan keputusan moral. Bagi Moya, sebetulnya dalam kehidupan praktis, sulit menemukan seorang pelaku moral menjadi sumber terakhir (*ultimate source*) sekaligus pengontrol terakhir (*ultimate control*) pada saat yang bersamaan dalam tindakan-tindakan moralnya sebagaimana dicita-citakan Immanuel Kant. Setiap pelaku moral biasanya berusaha menjaga keseimbangan antara kedua aspek tersebut (CM: 2006, hlm 117). Pengontrol terakhir memang

mengafirmasi eksistensi kebebasan; bahwa eksekusi tindakan-tindakan tertentu benar-benar berasal dari kehendak bebas pelaku moral. Meskipun demikian, menurut Moya, bukan tidak mungkin situasi partikular dan keadaan politik mempengaruhi kehendak bebas dalam tindakan moral (CM: 2006, hlm 122). Dalam arti ini naiflah kita mengharapkan pelaku moral menjadi sumber terakhir (*ultimate source*) dan satu-satunya sumber bagi seluruh tindakan moralnya. Memang pelaku moral rasional sebagai *the ultimacy* sebagaimana juga dicita-citakan Kant tetap menjadi faktor penting, misalnya ketika kita ingin mendesakkan nilai-nilai moral tertentu supaya menjadi nilai moral publik. Di sini pelaku moral sebagai sumber terakhir prinsip moral mengindikasikan adanya otentisitas di mana kehendak bebas (*free will*) terekspresikan secara penuh dalam diri pelaku moral selaku sumber terakhir (CM: 2006, hlm 123). Tetapi sekali lagi kondisi ideal ini tidak harus menyandera tanggung jawab moral ketika situasi partikular tertentu atau keadaan politis tertentu mempengaruhi pengambilan keputusan moral. Karena itu, bagi Carlos Moya tantangannya bukan pada sejauh mana otentisitas semakin tinggi yang juga memurnikan kehendak bebas, tetapi bagaimana pelaku moral menghadapi “*the problem of plurality*” (CM: 2006, hlm 127), di mana otentisitas atau kualitas moral pelaku moral ditentukan bukan oleh kadar *the ultimacy* tetapi kemampuan menentukan pilihan moral di hadapan beraneka ragam pilihan moral yang tersedia.

Berpihak pada Keyakinan Moral?

Ketika menegaskan tanggung jawab moral, Carlos Moya membedakan konsep “sumber terakhir” (*the ultimate source*) dan “kontrol rasional” (*rational control*). Apakah pembedaan semacam ini sanggup menjadi jalan keluar yang meyakinkan untuk menegaskan tanggung jawab moral?

Pertanyaan ini berhubungan dengan keraguan yang dikemukakan Galen Strawson, bahwa “*true self-determination is logically impossible*” (CM: 2006, hlm. 145). Alasannya, “*true self-determination*” menuntut *actual completion* setiap pilihan tindakan yang harus dipertahankan secara konsisten (tidak boleh mengalami apa yang disebut sebagai “*infinite regress*”). Jadi, misalnya seorang pelaku moral berada dalam situasi pilihan moral, apakah harus melakukan korupsi atau tidak? Mengikuti prinsip *ultimacy of source* dan *rational control*, pelaku moral memang sedang menghadapi sebuah situasi dilema moral (situasi *ku* atau kesadaran bahwa ada dilema moral yang sedang *kuhadapi*). Kesadaran inilah yang memicu nalar (*reason*) untuk melakukan refleksi evaluatif. Begitu pelaku moral mengeksekusi sebuah prinsip penjustifikasi tindakan, prinsip tersebut tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga menunjukkan originalitas tindakan, bahwa itu adalah tindakan moral si

A (tindakan^{ku}). Tanggung jawab moral lalu terkait erat dengan pilihan rasional tindakan moral tersebut. Eksekusi tindakan berdasarkan prinsip penjustifikasi tertentu ini yang diistilahkan sebagai *actual completion*, apa yang sehari-hari kita sebut sebagai tindakan konkret tertentu berdasarkan prinsip moral tertentu. Agar pelaku moral dapat menentukan diri secara otentik (*true self-determination*), eksekusi tindakan moral berdasarkan prinsip penjustifikasi tertentu itu tidak boleh mengalami kemunduran dalam arti pelaku moral harus konsisten mendasarkan perilakunya pada prinsip penjustifikasi yang telah ditetapkannya tersebut.

Bagi Strawson, masalahnya tidak semudah itu. Tindakan moral yang dipilih (*actual completion*) seringkali justru menunjukkan adanya *infinite regress*. Dengan kata lain, hampir mustahil mengharapakan pelaku moral selalu bertindak secara konsisten sesuai prinsip penjustifikasi tindakan yang telah dipilihnya, padahal pluralisme moral telah menjadi fakta keras yang harus dihadapinya. Lebih lanjut Strawson juga melihat bahwa pilihan tindakan yang diambil secara rasional sering tidak secara otomatis bersifat ultim. Tindakan seringkali didorong oleh pilihan individu atau pilihan pelaku moral berdasarkan keadaan atau konstitusi batin (*mental constitution*) tertentu, apa yang disebut juga sebagai “karakter” yang pembentukannya ikut dipengaruhi oleh situasi aktual tertentu (CM: 2006, hlm 145).

Di sinilah Carlos Moya melihat perlunya sikap kritis terus-menerus terhadap tanggung jawab moral. Apakah dengan mengafirmasi tanggung jawab moral, kita telah berhasil memenangkan perdebatan melawan determinisme? Carlos Moya mengingatkan kita, seluruh diskusi yang dikemukakan di atas yang mencoba membedakan pelaku moral sebagai sumber ultim (*ultimate source*) dan sebagai pengontrol rasional (*rational control*) semuanya menekankan secara berlebihan kemampuan kehendak (*will*) dan semua hal yang berhubungan dengannya, terutama pilihan-pilihan tindakan (*choices*). Bahwa si A bertanggung jawab atas tindakan-tindakan moralnya karena dia memilih bertindak dalam cara tertentu sesuai prinsip moral tertentu yang telah dipilihnya (secara rasional). Masalahnya, apa yang bisa diafirmasi jika pemahaman seperti ini ditolak—Strawson sebagai satu contoh filsuf yang menolak sikap percaya berlebihan pada kemampuan kehendak bebas (*free will*) pelaku moral? Apakah memang tidak ada tanggung jawab moral ketika kehendak (*will*) telah ditolak sebagai bagian integral dari pilihan dan tindakan moral? Sembari menekankan pentingnya selalu bersikap kritis terhadap setiap pertimbangan dan refleksi moral, Carlos Moya menawarkan gagasan, bahwa masalahnya bukan semata-mata terletak pada bagaimana pelaku moral memilih tindakan-tindakan moralnya secara

rasional (*choices*) dan menghendaki tindakan tersebut sebagai tindakannya sendiri, tetapi lebih pada bagaimana pelaku moral meyakini bahwa pilihan dan tindakan moralnya adalah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Carlos Moya memberikan penekanan pada keyakinan moral (*beliefs*) sebagai semacam jalan keluar mengatasi serangan determinisme (CM: 2006, hlm 147).

Untuk menjelaskan posisi pemikirannya mengenai keyakinan moral, Carlos Moya meminjam pemikiran Bernard William (1973), seorang filsuf moral abad ke-20, terutama dalam karyanya *Problems of the Self* (Cambridge University Press, 1973). Bagi Bernard William, pengambilan keputusan moral seharusnya melampaui kendali atau kontrol kehendak, dan itu hanya bisa dilakukan oleh apa yang disebutnya sebagai keyakinan (*belief*). Bagi dia, hanya keyakinan yang tidak dikontrol oleh kehendak. Mengutip Bernard William, Carlos Moya menulis, “*Beliefs are not under our direct voluntary control, for there is not much room for deciding to believe*” (CM: 2006, hlm 152). Mengapa pengambilan keputusan moral harus dibebaskan dari kontrol atau kendali kehendak? Carlos Moya berpendapat, bahwa tujuan tertinggi dari setiap pengambilan keputusan moral adalah kebenaran (*truth*), dan kebenaran tersebut bukan merupakan hasil dari sebuah refleksi evaluatif pelaku moral, tetapi penyingkapan kebenaran pada dirinya. Demikianlah, Si A memilih untuk berbohong demi kebaikan mayoritas orang, misalnya (perspektif utilitarisme), pilihan tindakan ini diambil bukan karena kepatuhan pada prinsip “*the greatest good for the greatest number of people*” sebagai hasil kalkulasi rasional manusia, tetapi merupakan semacam penyingkapan kebenaran pada dirinya sendiri (CM: 2006, hlm. 153). Carlos Moya menulis, “*Beliefs aim to conform themselves to the way things actually are, whereas, for example, decisions and desires aim to change the world so that it conforms to them*” (CM: 2006, hlm 153).

Persoalannya, apakah cukup memadai jika pelaku moral menjustifikasi tindakan-tindakannya pada keyakinan tertentu? Sejauh mana keyakinannya sungguh-sungguh merupakan pengungkapan atas prinsip penjustifikasi tindakan yang eksistensinya bukan merupakan hasil akhir dari sebuah proses penalaran moral (*moral reasoning*)? Apakah keyakinan memiliki eksistensi pada dirinya sendiri, jadi memiliki karakter substantif, atau tetap merupakan buah dari sebuah penalaran moral?

Pertanyaan semacam ini tidak mudah dijawab secara meyakinkan, dan tampaknya Carlos Moya menyadari hal ini. Sebagai jalan keluar, Moya mengatakan bahwa tidak semua keyakinan (*beliefs*) relevan dalam mendasarkan tanggung jawab moral. Bagi dia, hanya keyakinan evaluatif (*evaluative beliefs*) yang dapat diacu sebagai prinsip penjustifikasi tindakan dan

tanggung jawab moral (CM: 2006, hlm. 157). Di sini keyakinan evaluatif yang Carlos Moya maksudkan adalah jenis keyakinan yang memiliki isi evaluatif, dengan dua karakteristik utama, yakni (1) kemampuan mengekspresikan cara bagaimana seorang pelaku moral memahami kehidupan manusia yang pantas dihidupi [*the way a person conceives of a human life that is worth living*]; dan (2) memiliki konsekuensi-konsekuensi potensial sebagai kriteria bagi pilihan dan patokan bagi tindakan [*and should have potential consequences as a criterion for choice and a guide for action*] (CM: 2006, hlm. 157).

Bagaimana keyakinan (*beliefs*) sebagai prinsip penjustifikasi tindakan dan tanggung jawab moral bisa diaplikasikan? Bayangkan Si A sedang menghadapi sebuah masalah moral di mana dia harus menentukan tindak moral yang harus diambilnya. Bagaimana si A dapat merujuk pada keyakinan sebagai pembimbing tindakan moral? Carlos Moya berpendapat bahwa dalam situasi demikian, Si A harus mengoperasikan keyakinan evaluatif (*evaluative beliefs*) secara benar yang sebetulnya sudah ada dalam dirinya sendiri melalui (1) pengungkapan secara jujur nilai-nilai yang dianut Si A; (2) sikap atau putusan partikular mengenai situasi konkret tertentu yang dihadapi; dan (3) pilihan-pilihan aktual serta tindakan konkret Si A sendiri.

Bagi Carlos Moya, proses pengoperasian keyakinan evaluatif ini hanya mungkin terjadi jika lima kondisi utama terpenuhi, yakni (1) kemampuan Si A menghubungkan nilai yang dianutnya dengan tanggung jawab moral yang lebih besar yang sifatnya askriptif (mewajibkan); dan bahwa prinsip umum yang askriptif tersebut adalah inti atau pusat atau pengatur perilaku moral dari Si A; (2) prinsip-prinsip moral umum yang sifatnya askriptif itu harus benar-benar merupakan prinsip penjustifikasi tindakan moral Si A secara aktual; (3) Si A harus memiliki kontrol yang rasional terhadap keyakinan-keyakinan moralnya sendiri, bahwa keyakinan-keyakinan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan secara rasional; (4) prinsip moral tersebut harus menjadi prinsip penjustifikasi setiap tindakan moral, bahkan terjadi bahwa kadang-kadang pelaku moral bertindak bertentangan dengannya; dan (5) pelaku moral tidak bersikap dogmatis terhadap prinsip-prinsip tindakannya tetapi justru harus memiliki alternatif prinsip tindakan yang bisa dirujuk jika prinsip moral yang berlaku sekarang sudah tidak memadai lagi (CM: 2006, hlm. 157).

Penutup

Mengikuti seluruh argumentasi yang dibangun Carlos Moya dalam buku ini, tampak bahwa senjata terandal yang digunakan melawan

determinisme adalah nalar (*reason*). Kita dapat memahami pilihan argumentasi Carlos Moya ini dari sudut epistemologis maupun etis.

Secara epistemologis, Carlos Moya melanjutkan warisan sikap kritis Cartesianisme yang mewajibkan setiap penahu mempertanggungjawabkan putusan dan pengetahuannya secara jelas dan terpilah-pilah sebagai tuntutan *natural lights* yang wajib dipenuhi dalam setiap produksi pengetahuan (*scientia*). Hanya pengetahuan jenis ini yang mampu membebaskan penahu dari sikap dogmatis dan kepercayaan naif pada keyakinan tertentu yang sebetulnya sekadar opini yang tidak didukung oleh bukti yang memadai (*sufficient evidence*).

Dalam arti ini sebetulnya tradisi-tradisi besar etika—taruhlah deontologisme dan utilitarisme—sebenarnya dapat dibaca dalam konteks usaha rasional mendasarkan prinsip penjustifikasi tindakan bukan pada prinsip-prinsip arkaik atau prinsip-prinsip dogmatis tertentu yang sifatnya eksternal (heteronomi moral), tetapi pada prinsip penjustifikasi tindakan yang dapat diuniversalisasikan (*universalizability principle*). Dalam terang dua tradisi besar etika ini kita mengerti betapa pelaku moral memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pilihan dan tindakan moralnya persis ketika prinsip penjustifikasi tindakan dikonstruksi dan dikritisi sebegitu rupa sesuai tujuan akhir yang ingin dicapai.

Secara etis, prinsip penjustifikasi yang dijadikan sebagai dasar tindakan tidak hanya memiliki karakter *clear and distinct*, tetapi justru memiliki kandungan bukti yang memadai (*sufficient evidence*). Rujukan Carlos Moya kepada etika keyakinan (*ethics of belief*) sebenarnya wajar jika ditempatkan dalam konteks usaha mengatasi atau melampaui determinisme kehendak (*will*).

Menarik dicatat, kehendak (*will*) memang mampu membebaskan pelaku moral dari kutukan determinisme. Artinya, pilihan untuk menghendaki sebuah tindakan moral sebagai tindakan_{ku} mampu melepaskan diri dari belenggu determinisme, bahwa tindakan moral ditentukan sepenuhnya oleh prinsip atau mekanisme tertentu yang *pre-established*. Meskipun demikian, tampaknya Carlos Moya sadar benar, kehendak (*will*) dapat menjadi determinisme baru jika seluruh pengambilan keputusan dan tindakan moral dipercayakan begitu saja pada kehendak bebas (*free will*) dalam menentukan tindakan moral pasca proses kritisisme prinsip moral dan kontrol rasional (*rational control*).

Merujuk ke epistemologi Descartes, kita bisa memahami kegundahan Carlos Moya ini dan alasan mengapa dia mengusulkan etika keyakinan (*ethics*

of belief) sebagai senjata pamungkas membela tanggung jawab moral menghadapi serangan determinisme. Descartes menegaskan dalam *Meditation*, bahwa ketika membuat sebuah putusan, “*it is clear by the natural light that perception of the intellect should always precede [praecedere semper debere] the determination of the will*” (1641, 7: 60). Dari sinilah para pembela etika keyakinan merumuskan *credo* mereka, bahwa sebagai pelaku moral “*we are always obliged to have sufficient evidence for every one of our beliefs*” (Andrew Chignell, 2010, hlm. 2). Demikianlah, pilihan mendasarkan tindakan pada prinsip moral tertentu selalu didasarkan pada keyakinan (*belief*) bahwa prinsip moral tersebut didukung oleh bukti yang memadai (*sufficient evidence*). Menyimak kondisi-kondisi yang dipersyaratkan Carlos Moya bagi keyakinan evaluatif (*evaluative belief*), di situ tampak jelas bagaimana tuntutan bukti yang memadai (*sufficient evidence*) sungguh diberi tempat.

Tampaknya Carlos Moya bukan seorang *evidentialist* murni yang bersikukuh mempertahankan keyakinan, bahwa setiap keyakinan moral selalu dan harus didasarkan pada bukti yang memadai. Keterbukaan pada alternatif prinsip tindakan moral dan sikap kritis terhadap prinsip tindakan yang dipilih pelaku moral saat ini tampaknya memberi tempat bagi prinsip *prima facie* yang selain sangat didukung kaum *non-evidentialist* semacam William James, juga lebih diterima sebagai penjustifikasi prinsip moral yang memadai (*sufficient*). Dalam arti ini usaha Carlos Moya membela dan mempertahankan tanggung jawab moral melawan serangan determinisme harus dikatakan berhasil dan memuaskan.***

DAFTAR PUSTAKA

- Audi, Robert, *The ethics of belief: doxastic self-control and intellectual virtue*, Synthese (2008) 161: 403-418.
- Bourke, John, *Responsibility, Freedom and Determinism*, Philosophy, Vol. 13, No. 51 (Jul., 1938), pp. 276-287, Cambridge University Press on behalf of Royal Institute of Philosophy, 1938.
- Carlos J. Moya, *Moral Responsibility: the Ways of Scepticism*, Routledge, London and New York, 2006.
- Deery, Oisin, *Extending Compatibilism: Control, Responsibility, and Blame*, Res Publica 13:209–230, Springer, 2007.

Haji, Ishtiyaque, *Freedom and Practical Reason*, Ethic Theory Moral Practice (2009), 12:169–179.

Ryan, Sharon, *Doxatic Compatibilism and the Ethics of Belief*, Philosophical Studies 114: 47–79, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2003.

Smythe, Thomas W., *Moral Responsibility*, The Journal of Value Inquiry 33: 493–506, Kluwer Academic Publishers, 1999.